



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
DAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TANGGAL 03 - 05 MEI 2021**

MASA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 - 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Besaran DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud juga termasuk di dalamnya terdapat temuan pemeriksaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Banten, di antaranya tercantum dalam LHP Kepatuhan atas belanja modal infrastruktur, LHP Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, LHP Kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, dan LHP atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten terkait dengan permasalahan DAK. Dengan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kunjungan kerja ke BPK Provinsi Perwakilan Banten dan Pemerintah Provinsi Banten ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan yang terkait DAK T.A 2017—2020 di antaranya sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk DAK Fisik dan Nonfisik.
2. Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK Fisik dan Nonfisik.
3. Pemeriksaan khusus/tematik beserta temuan/permasalahan yang signifikan dan berulang terkait DAK Fisik dan Nonfisik.
4. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
5. Dampak beserta kendala/hambatan terkait alokasi DAK Fisik dan Nonfisik.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan DAK Fisik dan Nonfisik. Hasil Pemeriksaan untuk TA 2017 - 2019 pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Banten masih ditemukan adanya permasalahan terkait penggunaan DAK dan di antaranya menjadi temuan berulang. Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap DAK, BPK RI selalu menemukan permasalahan penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan. Masukan dari BPK Perwakilan Banten terkait dengan permasalahan DAK tersebut diharapkan dapat menambah informasi yang lengkap dan utuh untuk BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Banten dihadiri oleh:

1. Kepala Perwakilan
2. Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara V
3. Kepala Subauditorat Perwakilan
4. Pemeriksa Madya
5. Pemeriksa Muda

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Banten, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten terkait dengan DAK. Anggaran DAK tercatat meningkat dari Rp4,6 triliun pada tahun 2017

menjadi Rp 4,9 triliun pada tahun 2020 sedangkan realisasi belanja tercatat menurun dari tahun 2017 sebesar Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,1 triliun pada tahun 2019.

Di samping itu, berdasarkan LHP BPK RI, trend opini laporan keuangan untuk pemerintah daerah di seluruh wilayah Banten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017—2019. Namun opini WTP tersebut masih disertai dengan adanya temuan dan permasalahan dalam laporan hasil pemeriksaan khususnya yang terkait dengan DAK. BPK perwakilan Banten telah melakukan pemeriksaan tematik kinerja “Pengelolaan Belanja Daerah untuk meningkatkan pembangunan Manusia” yang antara lain menemukan permasalahan terkait DAK namun BPK belum melakukan pemeriksaan anggaran DAK yang secara khusus bertujuan untuk mengukur hasil dan dampak terhadap masyarakat. Temuan terkait DAK di wilayah Banten di antaranya yaitu;

- Penganggaran DAK oleh Pemda belum didasarkan Perpres penetapan DAK.
- Pelaksanaan kegiatan DAK belum tepat waktu.
- Kegiatan DAK belum dilaksanakan seluruhnya dan belum dipertanggungjawabkan secara optimal.
- DAK tidak terealisasi pada Dinas Pendidikan.
- Realisasi kegiatan DAK belum optimal.

Di antara temuan tersebut BPK Perwakilan Banten juga memandang ada beberapa permasalahan yang signifikan, perlu mendapat perhatian dan berpotensi menjadi temuan berulang. Salah satu kendala penyelesaian permasalahan tersebut di antaranya terdapat perubahan juklak/juknis kegiatan yang terlambat dikeluarkan oleh kementerian teknis. Di sisi lain perkembangan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas temuan dan permasalahan tersebut mencapai 79% yang sesuai rekomendasi pada Semester II 2020.

Dalam sesi diskusi, selain mengapresiasi opini WTP dan pencapaian tindak lanjut, beberapa hal yang difokuskan terkait DAK yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya temuan khususnya temuan berulang, temuan di beberapa daerah yang hampir sama jenisnya, mekanisme perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, ketergantungan daerah akan DAK, tidak terealisasinya anggaran, dan hal-hal lain terkait dengan kendala, hambatan dan permasalahan DAK.

C. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di BANTEN

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

1. Gubernur Provinsi (diwakili Kepala BPKAD Provinsi Banten)
2. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Walikota/Bupati se- Provinsi Banten (dihadiri Wakil Bupati Lebak)

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Banten ini, BAKN DPR RI meminta masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK.

Pemerintah Daerah mengajukan usulan anggaran DAK melalui proposal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Pemerintah Pusat karena dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak sejalan dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu menyampaikan hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengusulan tersebut serta permasalahan terkait DAK. Adapun petunjuk lebih lanjut terkait alokasi DAK diatur oleh kementerian dan lembaga teknis pada masing-masing bidang.

Di samping itu, masih terdapat temuan berulang terkait dengan DAK pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten, di antaranya terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut ;

- LHP Kepatuhan atas belanja modal infrastruktur TA. 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan bahwa pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume atas lima pekerjaan yang dibiayai dari DAK.
- LHP Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Lebak TA. 2019 terdapat temuan ketidaksesuaian spesifikasi atas 15 paket pekerjaan dengan 4 paket pekerjaan diantaranya merupakan jenis kegiatan pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten (DAK Reguler).
- LHP Kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang terdapat temuan terkait pengelolaan DAK bidang kesehatan dengan permasalahan yaitu usulan alokasi pemanfaatan dak fisik pada sub bidang pelayanan dasar dan puskesmas belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan; pemanfaatan DAK fisik dan DAK nonfisik pada Tahun 2018 dan 2019 belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan; dan pemanfaatan DAK Nonfisik Jampersal pada Klaim Jasa Pelayanan belum tepat sasaran.

- LHP atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA. 2016—2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang dengan temuan keandalan penyusunan anggaran belanja atas realisasi dana alokasi khusus terhadap target pendapatan yang dianggarkan belum memadai.
- LHP atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016—2018 pada Pemerintah Kota Cilegon dengan temuan DAK tidak terealisasi pada Dinas Pendidikan dan temuan realisasi kegiatan DAK belum optimal.

D. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 03 - 05 Mei 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten, adalah sebagai berikut.

1. Anggaran DAK di wilayah Banten secara keseluruhan tercatat meningkat dari Rp4,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 4,9 triliun pada tahun 2020 sedangkan realisasi belanja tercatat menurun dari tahun 2017 sebesar Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,1 triliun pada tahun 2019.
2. Faktor-faktor penyebab realisasi belanja DAK yang tidak sesuai anggaran di antaranya karena petunjuk operasional tahun bersangkutan belum terbit, perubahan kebijakan juklak/juknis kegiatan yang terlambat dikeluarkan oleh kementerian teknis, dan prioritas pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan program prioritas nasional.
3. BAKN DPR RI mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Banten selama tahun 2017—2019. Namun pencapaian opini tersebut masih disertai dengan temuan/permasalahan khususnya terkait dengan Dana Alokasi Khusus yang masih harus ditindaklanjuti.
4. BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan tematik kinerja “Pengelolaan Belanja Daerah untuk meningkatkan pembangunan Manusia” yang antara lain menemukan permasalahan terkait DAK namun BPK belum melakukan pemeriksaan anggaran DAK yang secara khusus bertujuan untuk mengukur hasil dan dampak terhadap masyarakat.
5. Temuan/permasalahan dalam hasil pemeriksaan tersebut di antaranya cukup signifikan, perlu mendapat perhatian, serta berpotensi menjadi temuan berulang.

6. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas temuan dan permasalahan yang diungkap BPK mencapai 79% yang sesuai rekomendasi pada Semester II 2020.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Adapun saran dari BAKN DPR RI yaitu sebagai berikut

1. BAKN DPR RI memandang perlu adanya penelaahan lebih mendalam terkait dengan kesesuaian alokasi yang diusulkan pemerintah daerah hingga menjadi anggaran tahun berjalan dan juga realisasi belanja atas DAK mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
2. BAKN DPR RI memandang perlu adanya perhatian yang lebih serius terkait dengan adanya temuan/permasalahan berulang terkait DAK termasuk penyebab timbulnya temuan seperti adanya keterlambatan maupun perubahan kebijakan juklak/juknis kegiatan DAK.
3. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan tematik secara khusus yang terkait dengan anggaran DAK, baik itu pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.
4. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang agar dapat memastikan pelaksanaan kegiatan DAK telah sesuai dan mengetahui kendala teknis dalam pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.